

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**YULIA MARINTI
NIM: 13608/2009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

NAMA : YULIA MARINTI
NIM/BP : 13608/2009
KEAHLIAN : EKONOMI PUBLIK
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, September 2013

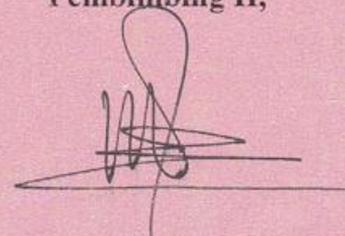
Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Drs. Alianis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

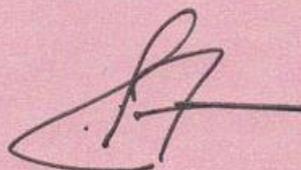
Pembimbing II,



Muhammad Irfan, SE, M.Si
NIP. 19770409 200312 1 002

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Alianis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

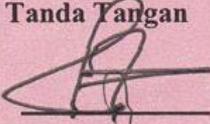
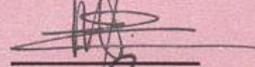
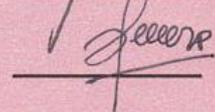
*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

NAMA : YULIA MARINTI
NIM/BP : 13608/2009
KEAHLIAN : EKONOMI PUBLIK
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, September 2013

Tim Penguji:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Drs. Alianis, M.S	1. 
2	Sekretaris	Muhammad Irfan, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Dr. Hasdi Aimon, M.Si	3. 
4	Anggota	Dewi Zaini Putri, SE, MM	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Marinti
NIM/BP : 13608/2009
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Sikaping, 16 Juli 1991
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Parkit 2 No. 8a ATB, Padang
No, HP/Telp : 085356430035
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang,

Yang menyatakan



Yulia Marinti

NIM/BP. 13608/2009

ABSTRAK

Yulia Marinti, (2009/13608): Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing 1. Drs. Ali Anis, M.S
2. Muhammad Irfan, SE, M.Si

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Dimasa otonomi daerah, daerah dituntut mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahan. Batas minimum daerah dikatakan mandiri yaitu 20% belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu kombinasi 19 kabupaten/kota yang terdapat di Sumatera Barat selama periode 2008-2010. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi panel.

Hasil penelitian ini secara parsial: (1) pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ($t_{hitung} = 0,7406 < t_{tabel} = 1,674$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,332 persen. (2) jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ($t_{hitung} = -2,1429 > t_{tabel} = -1,674$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,2557 persen. (3) Produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ($t_{hitung} = 3,5003 > t_{tabel} = 1,674$) dengan tingkat pengaruh 3,5003 persen. (4) Secara bersama-sama variabel *dependent* berpengaruh terhadap variabel *independent* dengan $F_{statistik}$ sebesar 4,7019 dan sisanya dipengaruhi variabel diluar model yang digunakan. Berdasarkan pemerintah dituntut mengintensifkan pengawasan pengalokasian belanja pembangunan agar pengeluaran pembangunan memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, serta pemerintah lebih maksimal mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan kegiatan ekonomi agar meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk Miskin dan Produk Domestik Regional Bruto.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Ali Anis, M.S dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Ali Anis, M.S, Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si, Bapak Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si, dan ibu Dewi Zaini Putri, SE. MM selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

4. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing selama belajar di Fakultas Ekonomi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Indonesia beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2009.
10. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, September 2013

Penulis

Yulia Marinti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1) Defenisi Otonomi Daerah	12
2) Defenisi Pendapatan Asli Daerah.....	13
3) Teori Penerimaan Pemerintah	16
4) Teori Barang Publik	18
B. Temuan Penelitian Sejenis	24
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Variabel Penelitian	31
F. Definisi Operasional Variabel.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
1) Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	40
2) Penduduk	42
3) Deskripsi Variabel Penelitian	44
a. Deskripsi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	44
b. Deskripsi Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten /Kota di Sumatera Barat	47
c. Deskripsi Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.....	51
d. Deskripsi Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.....	54
4) Analisis Induktif	57
a. Analisis Model Regresi Panel	57

b. Koefisien Determinasi (R^2).....	62
c. Pengujian Hipotesis.....	63
1) Uji t	63
2) Uji F	65
B. Pembahasan.....	65
1) Pengaruh Pengeluaran Pembangunan (pp) terhadap Pendapatan Asli daerah (pad) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	66
2) Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (miskin) terhadap Pendapatan Asli daerah (pad) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	68
3) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli daerah (pad) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	70
4) Pengaruh Pengeluaran Pembangunan (pp), Jumlah Penduduk Miskin (miskin), Produk Domestik Regional Bruto (pdrb) terhadap Pendapatan Asli daerah (pad) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Derajat Kemandirian Daerah Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2010..	3
2. Derajat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2010..5	
3. Total Pendapatan Daerah, Pengeluaran dan Surplus/Defisit Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010 (Dalam Milyaran Rupiah)	6
4. Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk Miskin dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010	7
5. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2010	43
6. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010 (Dalam Jutaan Rupiah)	45
7. Pengeluaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010 (Dalam Jutaan Rupiah)	49
8. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010	52
9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010 (Dalam Milyaran Rupiah)	55
10. Hasil Uji Chow	58
11. Hasil Uji Hausman.....	58
12. Hasil estimasi Random effect Model	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal menurut Piquo .	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Mentah.....	80
2. Hasil Uji Chow	82
3. Hasil Uji Hausman.....	83
4. Hasil Uji Regresi Panel.....	84
5. Tabel T.....	85
6. Tabel F.....	87
7. Surat Izin Penelitian.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Setiap daerah di Indonesia harus siap menghadapi otonomi daerah khususnya kabupaten dan kota, karena kabupaten dan kota merupakan unit pelaksanaannya. Otonomi daerah bertujuan agar kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan pelaksanaan otonomi daerah karena daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 juga menyatakan ada 16 kewenangan pemerintah daerah yang dimiliki kabupaten/kota, namun ada beberapa urusan pemerintah yang masih tetap dikelola oleh pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Pendapatan asli daerah semestinya menjadi sumber pembiayaan kebutuhan setiap daerah. Namun disebabkan kondisi dan potensi daerah yang berbeda maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah untuk mengurangi kesenjangan keuangan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan, dana

perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi sebagai pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu dana perimbangan juga berfungsi sebagai pemerataan keuangan daerah agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara daerah kaya dan daerah miskin.

Tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab adalah besaran pendapatan asli daerah yang diperoleh masing-masing kabupaten dan kota. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dimasa otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, daerah perlu menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan daerah. Seperti dinyatakan oleh salah seorang pakar World Bank, batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2003). Jika pendapatan asli daerah masih kurang dari 20% maka daerah tersebut dapat dikatakan belum mampu mandiri, serta masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu daerah, dapat dilihat melalui derajat kemandirian daerahnya. Derajat kemandirian daerah diperoleh dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat (Landiyanto, 2005).

Tabel 1: Derajat Kemandirian Daerah Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2010

No	Provinsi	PAD	Belanja Daerah	Derajat Kemandirian Daerah (%)
		Jutaan Rupiah		
1	Aceh	796.949	7.528.516	10,59
2	Sumatera Utara	2.554.780	3.666.706	69,68
3	Sumatera Barat	1.006.820	2.239.753	44,95
4	Riau	1.339.265	4.267.432	31,38
5	Jambi	686.629	1.488.130	46,14
6	Sumatera Selatan	1.371.083	3.108.036	44,11
7	Bengkulu	351.091	971.198	36,15
8	Lampung	1.118.340	2.004.899	55,78
9	Bangka Belitung	328.122	862.715	38,03
10	Kepulauan Riau	522.006	1.723.574	30,29
11	DKI Jakarta	12.891.992	21.552.895	59,82
12	Jawa Barat	7.252.242	9.020.608	80,40
13	Jawa Tengah	4.785.133	5.968.033	80,18
14	DI Yogyakarta	740.202	1.354.594	54,64
15	Jawa Timur	7.478.530	10.206.317	73,27
16	Banten	2.321.586	2.834.570	81,90
17	Bali	1.393.730	1.985.850	70,18
18	Nusa Tenggara Barat	515.340	1.275.746	40,40
19	Nusa Tenggara Timur	298.154	1.148.082	25,97
20	Kalimantan Barat	777.243	1.700.202	45,71
21	Kalimantan Tengah	504.217	1.477.348	34,13
22	Kalimantan Selatan	1.286.258	2.410.095	53,37
23	Kalimantan Timur	2.714.815	5.918.568	45,87
24	Sulawesi Utara	418.737	1.137.423	36,81
25	Sulawesi Tengah	411.797	1.127.256	36,53
26	Sulawesi Selatan	1.545.589	2.486.159	62,17
27	Sulawesi Tenggara	339.360	1.125.687	30,15
28	Gorontalo	133.147	567.080	23,48
29	Sulawesi Barat	90.207	607.672	14,84
30	Maluku	169.568	950.281	17,84
31	Maluku Utara	77.842	682.723	11,40
32	Papua Barat	125.774	3.104.771	4,05
33	Papua	380.025	5.650.474	6,73

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2008-2011, diolah

Tabel 1 memperlihatkan derajat kemandirian daerah provinsi-provinsi di Indonesia. Dimana terlihat pada tabel 1, derajat kemandirian daerah provinsi-provinsi di Indonesia sudah cukup baik. Rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah provinsi-provinsi di Indonesia sudah melebihi 20%. Sehingga rata-rata provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikatakan sudah mampu mandiri mengelola daerahnya seperti dinyatakan pakar World Bank tersebut.

Derajat kemandirian daerah terbesar diperoleh provinsi Banten yaitu 81,90 persen dan terendah adalah provinsi Papua Barat sebesar 4,05 persen, diikuti provinsi Papua dan provinsi Aceh masing-masing 6,73 persen dan 10,59 persen. Besarnya derajat kemandirian daerah provinsi-provinsi di Indonesia diharapkan juga sejalan dengan derajat kemandirian kabupaten dan kota setiap provinsi-provinsi di Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat memiliki derajat kemandirian daerah sebesar 44,95 persen. Hal ini sudah cukup baik, karena provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi syarat minimum suatu daerah dikatakan mampu mandiri untuk mengelola daerahnya. Namun hal ini tidak sejalan dengan derajat kemandirian daerah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat.

Terlihat pada tabel 2, tidak terdapat satu pun kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki kontribusi lebih dari 20 persen terhadap belanja daerah. Derajat kemandirian daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat hanya berkisar antara 2 persen hingga 10 persen. Derajat kemandirian daerah terbesar diperoleh

kota Padang yaitu 10,6 persen dan terendah kabupaten Solok Selatan sebesar 2,3 persen.

Tabel 2: Derajat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jutaan Rupiah		Derajat Kemandirian Daerah (%)
		PAD	Belanja Daerah	
1	Kabupaten Kep. Mentawai	28.354	458.396	6,19
2	Kabupaten Pesisir Selatan	17.595	725.141	2,43
3	Kabupaten Solok	19.620	537.104	3,65
4	Kabupaten Sijunjung	21.973	494.231	4,45
5	Kabupaten Tanah Datar	36.941	568.631	6,50
6	Kabupaten Padang Pariaman	24.706	710.430	3,48
7	Kabupaten Agam	22.952	594.603	3,86
8	Kabupaten 50 Kota	17.435	551.919	3,16
9	Kabupaten Pasaman	16.094	439.038	3,67
10	Kabupaten Solok Selatan	7.360	319.351	2,30
11	Kabupaten Dharmasraya	25.541	453.188	5,64
12	Kabupaten Pasaman Barat	24.205	490.644	4,93
13	Kota Padang	116.691	1.100.368	10,60
14	Kota Solok	18.574	317.287	5,85
15	Kota Sawahlunto	23.782	308.113	7,72
16	Kota Padang Panjang	27.476	320.274	8,58
17	Kota Bukit Tinggi	33.847	363.236	9,32
18	Kota Payakumbuh	36.640	356.247	10,29
19	Kota Pariaman	14.884	340.989	4,37

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2010, diolah

Rendahnya derajat kemandirian daerah tentunya menjadi persoalan bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan rendahnya derajat kemandirian daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Sumatera Barat masih sangat bergantung pada dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga mengurangi

ketergantungan pada dana perimbangan (jika tidak bisa dihilangkan) agar dengan meningkatnya PAD akan menciptakan kemandirian daerah.

Tabel 3: Total Pendapatan Daerah, Pengeluaran dan Surplus/Defisit Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008, 2009 dan 2010 (Dalam Milyaran Rupiah)

No	Pendapatan dan Belanja Daerah	Tahun					
		2008	Share (%)	2009	Share (%)	2010	Share (%)
I	Total Penerimaan	8.289,3	100	8.551,9	100	9.182,8	100
1	Pendapatan Asli Daerah	509,7	6,15	535,4	6,26	534,7	5,82
2	Dana Perimbangan	7.163,1	86,41	7.365,1	86,12	7.569,2	82,43
3	Lain-lain PAD yang Sah	616,5	7,44	651,4	7,62	1.079	11,75
II	Total Belanja Daerah	7.977,9	100	8.832,4	100	9.432,4	100
1	Belanja Tidak Langsung	4.596,9	57,62	5.564,3	63	6.238,7	66,14
2	Belanja Langsung	3.381,0	42,38	3.268,0	37	3.193,7	33,86
III	Defisit/Surplus	311,5		-280,5		-249,6	

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Sumatra Barat 2008-2010, diolah

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai besaran kontribusi total pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang bisa dilihat pada tabel 3 yang menyajikan total pendapatan, belanja daerah dan surplus/defisit selama tahun 2008, 2009 dan 2010. Terlihat bahwa total pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat setiap tahunnya, terlihat lebih dari 80 persen pendapatan daerah diperoleh dari dana perimbangan. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya menyumbang sekitar 6 persen setiap tahunnya, dan sisanya diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah. Sehingga

dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat mayoritas di biayai oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Rendahnya total pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu jauh di bawah 20 persen, menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum mampu mandiri membiayai belanja daerah dan masih bergantung pada dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini tentu menjadi permasalahan dimasa otonomi daerah, karena otonomi daerah dilaksanakan agar terciptanya kemandirian daerah dalam pengelolaan pemerintah kabupaten/kota dan pengoptimalan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dipengaruhi oleh indikator sosial dan ekonomi masyarakat serta besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Besarnya pengeluaran daerah, khususnya pengeluaran pembangunan tentunya akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi, karena pengeluaran pembangunan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga besarnya pengeluaran pembangunan akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 4 memperlihatkan rata-rata pengeluaran pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Terlihat rata-rata pengeluaran pembangunan cukup besar setiap tahunnya. rata-rata pengeluaran pembangunan besar pada tahun 2008 yaitu sebesar 177.948.490.000 rupiah. Meskipun cenderung terjadi sedikit penurunan rata-rata pengeluaran pembangunan dari 2008-2010, namun hal

ini diharapkan tidak berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Karena masyarakat merupakan penyumbang dari sumber-sumber PAD tersebut. Namun kemampuan penduduk untuk membayar pajak dan retribusi tentunya bervariasi sesuai tingkat kesejahteraannya.

Tabel 4: Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk Miskin dan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2008-2010

No	Tahun	Pengeluaran Pembangunan (Jutaan Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin	Rata-rata PDRB (Jutaan Rupiah)
1	2008	177.948,49	503.297	1.868.983,94
2	2009	172.001,69	456.191	1.968.887,69
3	2010	168.975,90	457.267	2.084.590,76

Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah dari berbagai sumber

Penduduk miskin cenderung tidak memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penduduk miskin cenderung memiliki kemampuan konsumsi yang rendah terhadap barang dan jasa yang dikenakan pajak dan retribusi daerah. Sehingga diasumsikan jumlah penduduk miskin mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Tabel 4 memperlihatkan jumlah penduduk miskin selama Tahun 2008 hingga tahun 2010 cenderung berkurang, meskipun pada tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin. Kecenderungan penurunan jumlah

penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Faktor lainnya yang diperkirakan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Sumatera Barat. Terlihat pada tabel 4, dari tahun 2008 hingga tahun 2010 terjadi peningkatan rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Sumatera Barat. Rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Sumatera Barat terbesar pada tahun 2010 yaitu 2.084.590.760.000 rupiah. Peningkatan rata-rata produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Sumatera Barat setiap tahun, diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk sehingga nantinya juga berpengaruh pada peningkatan kemampuan penduduk untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah yang berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya.

1. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

2. Sejauhmana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian diantaranya.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi publik

2. Bagi pengambil kebijakan, sebagai landasan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatra Barat
3. Bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah
4. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

1) Defenisi Otonomi Daerah

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini kemandirian setiap daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya harus dapat diatasi, dikarenakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat pada daerah untuk mengatur pemerintahan daerah masing-masing. Menurut Ateng Syafruddin, otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tapi bukan kemerdekaan (Dewi, 2002:5).

Hidayat Syarief menyatakan ada tiga alasan pokok diperlukannya otonomi daerah tersebut. Pertama adalah *political equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua adalah *local accountability*, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketiga adalah *local responsiveness*, yaitu meningkatkan tanggung jawab pemerintah terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi yang terjadi di daerahnya (Sjafrizal, 2008:230).

Lebih lanjut Mardiasmo (2004:59) menyatakan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (b) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya

daerah, dan (c) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sehingga dengan terlaksananya otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola daerah sendiri, agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik, pengelolaan daerah sesuai dengan potensinya dan masyarakat dapat turut berpartisipasi proses dalam pembangunan daerahnya. Namun hal ini beriringan dengan tanggung jawab yang semakin besar pula bagi daerah dalam pengelolaan daerahnya.

2) Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Dimana pendapatan daerah terdiri dari (a) pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana bagi Hasil dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah menurut Bartakusuma dan Solihin yaitu pendapatan yang berasal dari daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut (Setiyawati dan Hamzah, 2007).

i. Pajak Daerah

Menurut Kaho (2005:145), pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2011:13), pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu.

1. Jenis pajak provinsi, terdiri dari (a) Pajak Kendaraan Bermotor (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, dan (e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

ii. Retribusi daerah

Secara umum, retribusi (Kaho, 2005:170) adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka tidak dikenakan iuran tersebut.

Dalam Mardiasmo (2011:18), dinyatakan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagai berikut.

- 1) Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- 2) Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

iii. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Badan Pusat Statistik menyatakan penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari laba perusahaan air minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/inverstasi pihak ketiga (Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, 2012 :ix).

iv. Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah terdiri dari (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (e) komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

3) Teori Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah merupakan hal yang menentukan besaran pengeluaran pemerintah. Semakin besar penerimaan maka akan semakin besar pengeluaran yang dapat dilakukan pemerintah yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat karena pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahayu (2010:222) berpendapat bahwa penerimaan atau pendapatan negara (government revenue) adalah semua penerimaan kas umum (kas pemerintah pusat) atau kas daerah (kas pemerintah daerah) dari berbagai sumber yang sah yang menambah equitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Mangkoesoebruto (2001:181), pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Hal senada juga dinyatakan Widanta (2008), bahwa pada intinya penerimaan pemerintah terdiri dari pajak, retribusi, denda-denda dan

perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya perijinan (lisensi), pencetakan uang kertas, hasil dari undian negara, pinjaman dan hadiah.

Adam Smith dan para ahli keuangan lainnya menyatakan suatu sistem pajak yang baik harus memenuhi beberapa kriteria (Mangkoesoebroto, 2001:214), yaitu.

- a. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan “bagiannya yang wajar”
- b. Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak (*excess burden*) harus seminimal mungkin
- c. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrument pajak dapat melakukannya
- d. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
- e. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak
- f. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin
- g. Kepastian
- h. Dapat dilaksanakan
- i. Dapat diterima

Ada dua macam prinsip keadilan yang digunakan dalam membahas keadilan dalam sistem pajak yaitu *pertama*, prinsip manfaat (*benefit principle*)

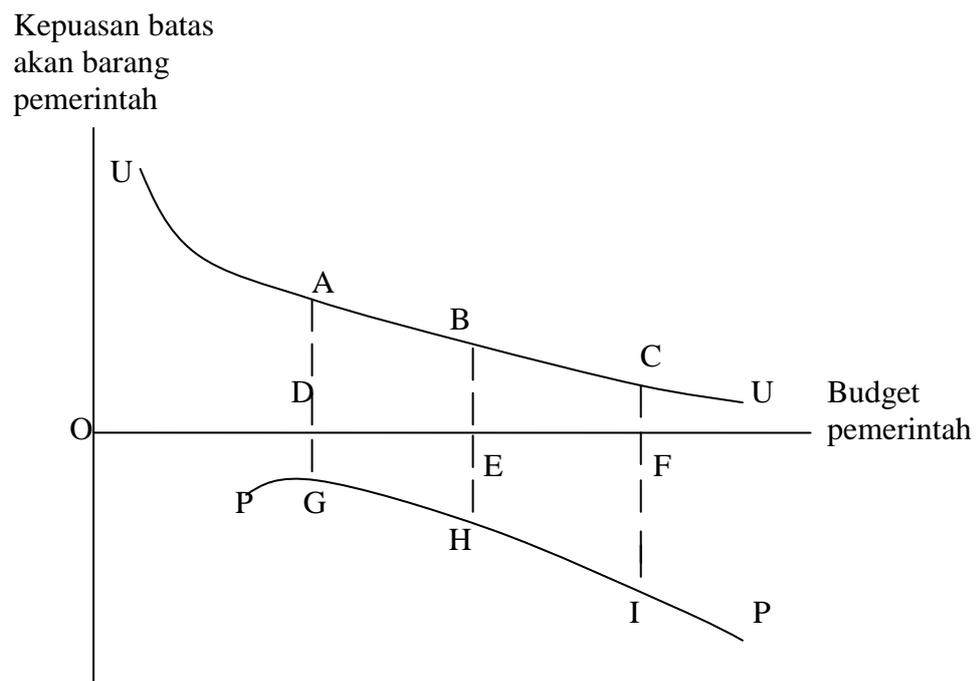
yaitu setiap orang akan bersedia membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktifitas pemerintah. Dan jika seseorang tidak memperoleh manfaat dari aktifitas pemerintah maka dia tidak akan bersedia membayar pajak sejumlah apapun. *Kedua*, prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) yaitu setiap orang harus membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk membayar (Mangkoesobroto, 2001:215).

Mangkoesobroto (2001:217) menyatakan, tiga ukuran kemampuan seseorang membayar pajak adalah pendapatan, pengeluaran konsumsi dan kekayaan. Semakin besar pendapatan, pengeluaran konsumsi dan kekayaan seseorang, maka akan semakin meningkat pula kemampuannya membayar pajak, sehingga akan meningkatkan pajak yang diterima daerah. Ukuran kemampuan yang paling sering digunakan adalah pendapatan dan struktur pajaknya dapat dibedakan antar pajak progresif, proporsional dan regresif (Mangkoesobroto, 2001:220). Pajak dikatakan progresif apabila persentase pajak terhadap pendapatan naik dengan semakin meningkatnya pendapatan. Struktur pajak dikatakan proporsional jika persentase beban pajak terhadap pendapatan tidak berubah dengan meningkatnya pendapatan dan struktur pajak dikatakan regresif ketika persentase beban pajak terhadap pendapatan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

3. Teori Barang Publik

Pigou dalam Mangkoesobroto (2001:64) menyatakan bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal (*marginal disutility*) akan

pajak yang dipungut untuk program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik. Karena menurut Pigu, dengan semakin banyak barang publik yang disediakan pemerintah maka semakin rendah kepuasan marginal yang dirasakan masyarakat. hal ini disebabkan pajak yang dipungut pemerintah merupakan pungutan yang dipaksakan kepada masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak puas bagi masyarakat dalam membayarnya. Oleh karena itu, kurva ketidakpuasan masyarakat akan barang yang dipungut memiliki bentuk yang meninggi, dengan semakin banyak pajak yang dipungut maka akan semakin besar ketidakpuasan masyarakat dalam membayarnya.



Gambar 1: Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal menurut Pigu

Sumber : Mangkoesobroto (2001: 66)

Teori Pigu dapat digambarkan seperti kurva UU seperti gambar 1. Titik O kebawah merupakan ketidakpuasan marginal. Jika pemerintah menyediakan barang publik terlalu sedikit maka kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan

dengan menambah anggaran untuk barang publik. Titik E merupakan titik optimum kepuasan marginal masyarakat atas barang publik dan pembayaran pajak karena kepuasan marginal masyarakat sama dengan ketidakpuasan masyarakat dalam membayar pajak.

Digunakannya teori barang publik Pigou pada penelitian ini, karena Pigou menyatakan pajak merupakan sumber anggaran dalam penyediaan barang publik. Sehingga dengan semakin besarnya PAD yang diperoleh maka akan semakin besar kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan barang publik masyarakat. PAD perlu ditingkatkan agar dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan (Halim, 2004:105).

Halim (2004:35) berpendapat, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan kepada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Namun besaran penerimaan PAD saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri sehingga membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

Jaya dalam Alwi et. al (TT) menyatakan, penyebab tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yaitu (a) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, (b) tingginya derajat sentralisasi dalam

bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat, (c) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (d) alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, (e) kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Karena besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (dana perimbangan), maka Suparmoko (2002: 52) menyatakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu pemerintah harus mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi dan penyediaan barang publik harus semaksimal mungkin serta kinerja perusahaan juga harus ditingkatkan agar mampu meningkatkan keuntungan. Kaho (2005:123) menambahkan, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi ketergantungan pada pemerintah pusat adalah dengan melibatkan masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat difungsikan sebagai substitusi energi pusat dan sebagai sumber energi alternatif bagi daerah, sehingga secara bertahap dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Dibalik tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, Widayat dalam Alwi et. al (TT) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain

adalah (1) banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB), (2) badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah, (3) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya, (4) adanya kebocoran-kebocoran, (5) biaya pungut yang masih tinggi, (6) banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, dan (7) kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. Lebih lanjut Alwi et. al (TT) juga menambahkan, bahwa kesenjangan fiskal dan rendahnya PAD lebih banyak dipengaruhi oleh perpajakan dan permasalahannya adalah kemampuan menghimpun dana kurang mengoptimalkan pengelolaan *resources endowment*, tuntutan pembangunan dan tingkat urbanisasi.

Menurut Lutfi (2006) ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah. Riduansyah (2003) lebih lanjut menambahkan, agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Hal senada juga dinyatakan Davey dalam Utoyo (2008), kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (*tax object*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari objek pajak tersebut. Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran seperti inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Utoyo (2008), setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk.

Perbedaan ekonomi sebagaimana dinyatakan Utoyo (2008), diasumsikan perbedaan kondisi ekonomi daerah yang akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Sehingga berdampak negatif pada PAD yang akan diterima. Karena penduduk miskin, dengan kondisi ekonomi yang lemah, cenderung tidak memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada PAD.

Hal lain yang juga mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yaitu pengeluaran pembangunan. Musgrave (1993:122) menyatakan faktor yang banyak mempengaruhi pengeluaran pembangunan adalah jumlah penduduk dan harga. Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta keamanan daerah. pembelanjaan tersebut akan meningkatkan

pengeluaran agragat dan mempertinggi kegiatan ekonomi daerah (Sukirno, 2011:153-168). Sehingga dengan meningkatnya kegiatan ekonomi akan berdampak pada peningkatan penerimaan pemerintah dalam bentuk pendapatan daerah.

2.2.Temuan Penelitian Sejenis

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini didasari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.

1) Blane D. Lewis (2005)

Penelitiannya berjudul “Indonesian Local Government Spending, Taxing and Saving: An Explanation of Pre and Post-desentralization Outcomes*”. Penelitian ini membandingkan PAD, pengeluaran pemerintah dan surplus sebelum dan setelah desentralisasi. Sebelum desentralisasi, kenaikan transfer pusat meningkatkan pengeluaran namun tidak berdampak pada pajak dan tabungan. Kenaikan pendapatan perkapita, meningkatkan PAD perkapita dan pengeluaran perkapita. Peningkatan kemiskinan akan menurunkan PAD dan pengeluaran daerah. Kenaikan jumlah penduduk perkotaan meningkatkan belanja dan PAD namun tidak berdampak pada tabungan.

Setelah desentralisasi, daerah dibagi menjadi kaya dan tidak kaya. Pertama, daerah kaya. Kenaikan transfer pusat akan meningkatkan pengeluaran, PAD dan tabungan. Pendapatan perkapita tidak memiliki dampak pada daerah kaya. Peningkatan kemiskinan mengakibatkan pengeluaran meningkat, penurunan PAD dan tabungan. Kenaikan jumlah penduduk perkotaan akan meningkatkan pengeluaran dan pajak serta mengurangi tabungan. Kedua, daerah yang tidak kaya. Kenaikan transfer pusat, meningkatkan pengeluaran, pajak dan tabungan. Kenaikan pendapatan pribadi meningkatkan pajak dan belanja namun mengurangi tabungan. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh pada belanja, pajak dan tabungan. Peningkatan penduduk perkotaan, akan meningkatkan PAD dan tabungan namun mengurangi belanja daerah.

2) Arief Eka Atmaja (2011)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Semarang. Secara parsial, jumlah penduduk merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar yaitu penambahan 1 orang penduduk meningkatkan PAD sebesar 7.600 rupiah, kemudian PDRB dan pengeluaran daerah masing-masing sebesar 3,078 rupiah dan 3,445 rupiah terhadap pendapatan asli daerah di kota Semarang.

3) Daru Kuncoro (2003)

Penelitian ini berjudul “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah”. Variabel yang digunakan adalah pengeluaran pembangunan dan produk domestik regional bruto perkapita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan dan produk domestik regional bruto perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan nilai koefisien masing-masing 0,29% dan 0,28 % terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Hal ini bermakna dengan kenaikan 1% pengeluaran pembangunan dan produk domestik regional bruto perkapita maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

4) Aryanti dan Indarti (TT)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang”. Variabel yang digunakan adalah produk domestik regional bruto dan inflasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah periode 2000-2009 di kota Semarang.

2.3.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah.

Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”, variabel dependen yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah dan variabel independennya adalah pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan PDRB. Untuk selanjutnya variabel dependen juga dipengaruhi secara bersama-sama oleh semua variabel independen.

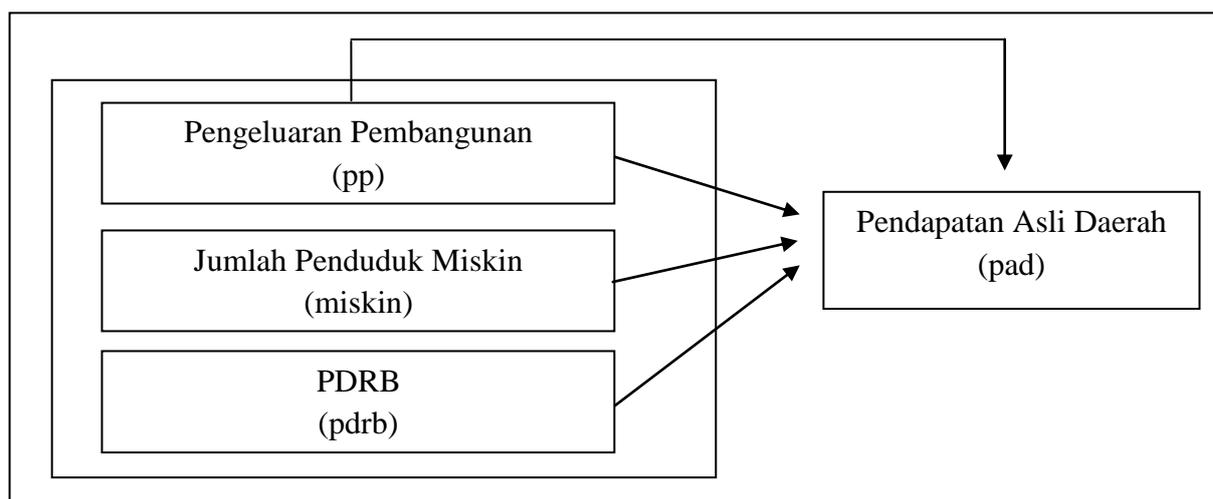
Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini diasumsikan karena pengeluaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Sehingga peningkatan kegiatan ekonomi daerah tersebut, nantinya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini diasumsikan karena penduduk miskin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, sehingga tingkat konsumsi juga rendah. Rendahnya kemampuan konsumsi masyarakat berdampak pada menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat karena kontribusi masyarakat miskin dalam membayar pajak dan retribusi daerah rendah.

Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat. Hal ini karena produk domestik regional bruto merupakan nilai output barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah. Dengan semakin meningkatnya produk domestik regional bruto suatu daerah maka diasumsikan akan semakin meningkat pula pendapatan penduduk daerah tersebut. Sehingga diasumsikan peningkatan produk domestik regional bruto akan berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Secara bersama-sama pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat.

Secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

2.4.Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. Pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Jumlah penduduk miskin mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Artinya, besar kecilnya pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat tidak ditentukan oleh pengeluaran pembangunan.
2. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan nilai koefisien sebesar -0,2557. Artinya apabila jumlah penduduk miskin meningkat 1 persen maka pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat akan berkurang sebesar 0,2557 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.
3. Produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan nilai koefisien sebesar 0,5335. Artinya apabila produk domestik regional bruto meningkat 1 persen maka pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat akan meningkat sebesar 0,5335 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.
4. pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan nilai $F_{\text{statistik}}$ sebesar 4,7018.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh positif namun tidak signifikan antara pengeluaran pembangunan (pp) terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten/kota di Sumatera Barat, mengindikasikan perlunya pengalokasian dana pengeluaran pembangunan yang lebih tepat sasaran agar meringankan beban masyarakat miskin, serta pengawasan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penggunaan dan pengalokasian dana pengeluaran pembangunan harus lebih maksimal agar program yang sudah dicanangkan dapat berjalan dengan optimal. Sehingga diharapkan pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi hingga nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Adanya pengaruh yang negatif antara jumlah penduduk miskin (miskin) terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten/kota di Sumatera Barat, mengimplikasikan perlunya upaya maksimal pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pengalokasian serta pengawasan belanja pembangunan dengan optimal, peningkatan daya beli masyarakat miskin salah satu dengan memberi subsidi. Diantaranya pemberian subsidi bahan kebutuhan pertanian serta pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Pemberian subsidi dan

bantuan lainnya pada penduduk miskin akan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraannya, sehingga mengurangi jumlah penduduk miskin dan juga meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3. Besarnya pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, mengimplikasikan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan produk domestik regional bruto dengan beberapa cara. Seperti meningkatkan belanja pembangunan salah satunya dengan perbaikan infrastruktur, sehingga dengan infrastruktur yang lebih baik akan memudahkan lalu lintas barang dan jasa. Pengendalian tingkat inflasi akan dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil, sehingga kegiatan ekonomi tidak terganggu. Serta hal lain yang sekiranya penting, yaitu kemudahan dalam hal administrasi seperti izin usaha. Kemudahan dalam mengurus izin usaha, akan meningkatkan investasi yang masuk ke daerah sehingga kegiatan ekonomi dapat tumbuh dengan lebih baik. Dengan demikian diharapkan semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk sehingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2004. Statistik 1. *Buku Ajar*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Alwi dan H, Syaharuddin, Mappa Nasrun. (Tanpa Tahun). “Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”. Diunduh dari www.pasca.unhas.ac.id pada tanggal 3 Maret 2013.
- Aryanti, Eni dan Iin Indarti. (Tanpa Tahun). “Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala.
- Atmaja, Arief Eka. 2011. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro. Diunduh dari www.eprints.undip.ac.id pada tanggal 3 Maret 2013.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2008-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2008-2010*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- . *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota 2008-2010*. BPS Sumatera Barat.
- . *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2008-2010*. BPS Sumatera Barat
- . *Sumatera Barat dalam Angka 2008-2010*. BPS Sumatera Barat.
- Dewi, Elita. 2002. “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”. *Jurnal USU Digital Library*. Diunduh dari www.library.usu.ac.id pada tanggal 5 Desember 2012.
- Gujarati, Damador. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi, Bunga Rampai)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.